



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Danau Aji Nomor 99 Telp. (0541) 661281 Fax 664541 Kode Pos 75512

e-mail : diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id

TENGGARONG

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2016-2021.

Dan pada Tahun 2021 nantinya menjadi tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2016-2021

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini.

Demikian dan dengan Izin dan KehendakNya semoga dokumen ini atau dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, Juli 2021

Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara



Drs. H. TAJUDDIN

NIP. 196404051986031036

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj. Ismi Nurul Huda, S.P., M.M	Sekretaris	
2	Asdian, S.E	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	
3	Samijan, S.E., M.Si	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
4	Dianto Raharjo, S.P., M.P	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Endri Rosandi, S.Sos	Kasubbag Penysusunan Program dan Keuangan	

DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2018 (T.C 29)	07
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM (T-C.30)	15
4.1	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas	18

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	16
BAB III. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB IV. PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Perubahan (RENJA-PD) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Rencana Kerja Tahunan yang paralel dengan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengacu pada Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja SKPD/OPD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD/OPD.

Renja OPD merupakan Dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Kemendagri nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1219/BAPP/V.1/065.11/07/2021, tanggal 2 Juli 2021, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2021.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Perubahan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2020, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupakan panjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB V. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
DINAS KOPERASI DAN UKM

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Rancangan Perubahan (Renja-PD) Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2016-2021 atau sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah lktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan. Maka dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja (RENJA-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T.C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM s/d Triwulan II Tahun 2021

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
						Target RENJA-PD Tahun (2021)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	80,00%	100,00%	0,00%	0%	Hasil Mapping	0,8	80%
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	80,00%	80,00%	100,00%	0,00%	0%		0,80	100%
			Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	2,00%	80,00%	2,00%	0,00%	0%		0,80	80%
			Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100%		1,80	80%
			Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100%		1,80	80%
			Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100%		1,80	80%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	48	12	0	41,67%		48	80%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan	5	4	1	0	41,67%	Masih dilakukan Perhitungan kekurangan, Rekons bersama Bpkad	4	80%

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	5	4	1	0	41,67%		4	80%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	30	24	6	3	50,83%		27	90%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	1	1	0	41,67%		1	50%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	28	22	5	3	60,00%	Terdapat pergeseran penempatan rekening belanja	25	89%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	5	4	1	0	20%	Hasil Mapping	4	80%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	5	4	1	0	20%		4	80%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan Laporan	63	32	30	0	0,10%		32	51%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	60	30	30	0	10%		30	50%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	3	2	1	0	10%		2	67%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	21	16	6	1	16,67%		17	81%

		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	5	4	1	1	99%		5	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1) Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor, 2) Jumlah Kotak Makan dan Minum	3	2	1	0	26%		2	67%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	5	4	1	0	30%		4	80%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	5	4	1	0	27%		4	80%
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah sarana dan prasarana	2	1	1	0	5%		1	50%
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	1	1	1	0	0%	Terkendala SDM IT dan dilakukan pergeseran ke Sub Prioritas	1	100%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	109	28	4	0	0%		28	26%
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah peralatan gedung kantor 2) Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	109	28	4	0	25%	Kurangnya sarana Pendukung Adm Perkantoran	28	26%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	915	691	224	209	93,3%		900	98%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	795	595	200	200	100%		795	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	60	48	12	5	41,67%	Kukurangan Blaya Langganan INTERNET	53	88%

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	60	48	12	4	33,33%	Pengurangan Tenaga Non ASN	52	87%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	21	30	3	0,1%		24	34,5%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1) Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan 2) Jumlah Pertzinan kendaraan dinas/operasional	20	8	6	3	0,50%		11	55%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung	72	11	20	0	11,00%		11	15%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, 2) Jumlah Pemeliharaan Rutin	6	2	4	0	11,00%		2	33%
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	81,53%	67,46%	4,14%	0	0,37%	Hasil Mapping	67,83%	83%
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	197	163	10	0	9,00%		163	83%
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	197	163	10	0	9,00%	Kekeliruan Penempatan Rekening, dilakukan Pergeseran Antar Rekening	163	83%

4	2.17.02	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	81,35%	74,97%	7,09%	3,54%	50%	Hasil Mapping	78,52%	97%
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendampingan dan Evaluasi	574	529	50	25	50,00%		554	97%
		Sub Kegiatan Pengawasan Kemandirian, Ketangguhan, Kesehatan, Kesehatan, serta Akuntabilitas Koperasi dan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Evaluasi	574	529	50	25	50,00%		554	97%
5	2.17.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMKM Wirusaha Baru	1940	1230	165	60	46%	Hasil Mapping	1290	66%
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Komitmen, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif	1940	1230	165	60	46%		1290	66%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah IUMK yang diterbitkan	860	660	75	0	25%		660	77%
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	(1) Jumlah Masyarakat Miskin dilatih 2) Jumlah Wirusaha yang dilatih	1080	570	90	60	67%		630	58%

6	2.17.02	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	3,60%	1,14%	0,38%	0	25%	Hasil Mapping	1,14%	32%
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	19	6	2	0	25%		6	32%
		Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1) Jumlah event dan publikasi yang diikuti, 2) Jumlah sarana dan prasarana usaha	19	6	2	0	25%	Kekeliruan Penempatan Rekening, dilakukan Pergeseran Antar Rekening	6	32%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Pada tahun anggaran 2021 ini dengan diberlakukannya Permendagri 90 tentang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATURPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH dan dimutakhirkan ke Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 maka diminta untuk dilakukan Pemetaan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Hasil Pemetaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun Anggaran 2021 baru mengkomodir dan melaksanakan 7 Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

- 1.1 Tingkat Ketepatan Pelaporan Keuangan
- 1.2 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 1.3 Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik
- 1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2021 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 4,662,908,984 atau 39,8 % dan Fisik sebesar 40%;

2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2021 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 0 dan Fisik sebesar 9%;

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Jumlah Pendampingan dan Evaluasi dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2021 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 24,583,080 atau 24% dan Fisik sebesar 50%;

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Jumlah Jumlah IUMK yang diterbitkan dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2021 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 0% dan Fisik sebesar 25%; dan Indikator Jumlah Masyarakat Miskin usia produktif yang dilatih dengan tingkat capaian Rp 0 dan Fisik 67% (60 orang), Dan Jumlah Wirausaha yang dilatih tingkat capaian/ realisasi Rp 0 dan Fisik 10%;

5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Jumlah Jumlah event dan publikasi yang diikuti dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2021 Realisasi Keuangan sebesar 0 % dan Fisik sebesar 25% dan Indikator Jumlah sarana dan prasarana usaha dengan realisasi Rp 0 % dan Fisik sebesar 25%;

Dari hasil Mapping tersebut Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

NO	INDIKATOR	SPM / standar nasional	I K K	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			77,79%	79,76%	85,86%	86,36%	86,86%	n/a	n/a	66,17%	71,40%	86,86%	86,86%	Pengukuran Pada tahun 2017 nomenklatur Disprindakop ke Diskop UKM
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN			2%	2%	2%	2%	2%	96,55%	100%	97,56%	100%	100%	100%	
	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP			84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	
	Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
2	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Bar			n/a	n/a	280	300	500	n/a	n/a	171	290	500	500	
	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru			n/a	n/a	280	300	500	n/a	n/a	171	290	500	500	
3	Persentase Koperasi Aktif		ikk	81,13%	81,23%	81,33%	81,43%	81,53%	77,13%	81,30%	81,85%	71,40%	86,86%	86,86%	
	Koperasi Melakukan RAT			28,50%	29,20%	30,50%	31,00%	31,50%	28,50%	29,20%	30,50%	31,00%	31,00%	31,50%	
	Cakupan Bina Koperasi			n/a	2,89%	3,13%	3,64%	5,26%	n/a	2,89%	3,13%	3,64%	3,64%	5,26%	
	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi			25%	28%	31%	33%	35%	25%	28%	31%	33%	33%	35%	
4	Persentase UMKM yang Naik Kelas			2,33%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	2,90%	2,84%	2,97%	3,23%	3,60%	3,60%	
	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro			2,33%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	2,90%	2,84%	2,97%	3,23%	3,60%	3,60%	
	Pertumbuhan Aset Usaha Mikro			2,33%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	2,90%	2,84%	2,97%	3,23%	3,60%	3,60%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM.
- l. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- m. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Fokus kepada Penanganan pandemi corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya,
2. Penyusunan dan penyempumaan Rencana Kerja perangkat Daerah (RENJA-P) Perubahan Tahun 2021 yang mengacu pada Rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
3. Perumusan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
4. Melakukan pemetaan dan Evaluasi Capaian target dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :

Dengan Rincian dan Jumlah Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
4. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Fokus kepada Penanganan pandemi corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya,
2. Penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja perangkat Daerah (RENJA-P) Perubahan Tahun 2021 yang mengacu pada Rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
3. Perumusan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
4. Melakukan pemetaan dan Evaluasi Capaian target dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :

Dengan Rincian dan Jumlah Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
4. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2021

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN APBD 2021 (KEPMENDAGRI 050-37080)				SETELAH PERUBAHAN APBD 2021 (KEPMENDAGRI 050-37080)				Selisih Antara Pagu Apbd 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Sebekum	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Sesudah		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.707.150.542,00				12.557.963.944,00	850.813.402,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.868.209.762,00				9.771.859.734,00	903.649.972,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKUKM	Tersedianya Gaji dan TunjanganASN	12 Bulan	8.763.768.762,00	DKUKM	Tersedianya Gaji dan TunjanganASN	12 Bulan	9.667.418.734,00	903.649.972,00	Tambahan kekurangan TPP 3 bulan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKUKM	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	104.441.000,00	DKUKM	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	104.441.000,00	0,00	Pergeseran Antar Rekening
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKUKM			339.999.800,00	DKUKM			339.999.800,00	0,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKUKM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	DKUKM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKUKM	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	189.999.800,00	DKUKM	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	189.999.800,00	0,00	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DKUKM			93.926.000,00	DKUKM			93.926.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKUKM	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	93.926.000,00	DKUKM	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	93.926.000,00	0,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKUKM			100.000.000,00	DKUKM			100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DKUKM	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	30 orang	50.000.000,00	DKUKM	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	30 orang	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKUKM	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	1 Inovasi	50.000.000,00	DKUKM	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	1 Inovasi	50.000.000,00	0,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKUKM			585.153.800,00	DKUKM			599.571.350,00	14.417.550,00	

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKUKM	Jumlah ATK	1 Paket	70.000.000,00	DKUKM	Jumlah ATK	1 Paket	70.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKUKM	1) Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor, 2) Jumlah Kotak Makan dan Minum	1 Paket, 800 Porsi	50.000.000,00	DKUKM	1) Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor, 2) Jumlah Kotak Makan dan Minum	1 Paket, 800 Porsi	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKUKM	Jumlah cetak dan penggandaan	2 Jenis	49.999.800,00	DKUKM	Jumlah cetak dan penggandaan	2 Jenis	49.999.800,00	0,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKUKM	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	223 OH	250.064.000,00	DKUKM	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	223 OH	250.064.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKUKM	Jumlah sarana dan prasarana	1 Paket	135.040.000,00	DKUKM	Jumlah sarana dan prasarana	1 Paket	135.040.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKUKM	Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	1 Web	30.050.000,00	DKUKM	Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	1 Web	0,00	-30.050.000,00	Digeser ke Kegiatan Prioritas Diklat Koperasi
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					DKUKM	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)	3 Bulan	44.467.550,00	44.467.550,00	Tambahan Bahan Bacaan/ Langganan Koran dan Publikasi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.348.400,00				256.729.400,00	114.381.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKUKM	1) Jumlah peralatan gedung kantor 2) Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis, 2 Jenis	142.348.400,00	DKUKM	1) Jumlah peralatan gedung kantor 2) Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	4 Jenis, 2 Jenis	256.729.400,00	114.381.000,00	Kurangnya sarana Pendukung Adm Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.096.790.920,00				915.155.800,00	-181.635.120,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKUKM	Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	200 lembar	1.199.000,00	DKUKM	Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	200 lembar	1.199.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	12 Bulan	152.859.432,00	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	12 Bulan	154.517.640,00	1.658.208,00	Kukurangann Biaya Langganan INTERNET
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKUKM	Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	12 Bulan	942.732.488,00	DKUKM	Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	12 Bulan	759.439.160,00	-183.293.328,00	Pengurangan Tenaga Non ASN
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKUKM			480.721.860,00	DKUKM			480.721.860,00	0,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKUKM	1) Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan 2) Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Jenis, 34 Unit	180.700.000,00	DKUKM	1) Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan 2) Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Jenis, 34 Unit	180.700.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKUKM	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung	20 Unit	14.850.000,00	DKUKM	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung	20 Unit	14.850.000,00	0,00	

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKUKM	1) Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, 2) Jumlah Pemeliharaan Rutin	1 Paket, 3 Jenis/Paket	285.171.860,00	DKUKM	1) Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, 2) Jumlah Pemeliharaan Rutin	1 Paket, 3 Jenis/Paket	285.171.860,00	0,00	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				100.000.250,00				100.000.250,00	0,00	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			100.000.250,00	Kab. Kutai Kartanegara			100.000.250,00	0,00	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	10 Unit	100.000.250,00	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	10 Unit	100.000.250,00	0,00	Pergeseran Antar Rekening
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								52.836.570,00	52.836.570,00	
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Kembang Janggut	Jumlah Peserta	30 org	52.836.570,00	52.836.570,00	Prioritas, dan elum terakomodir Peningkatan SDM dalam Meningkatkan Kualitas Koperasi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara			100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara			100.000.000,00	0,00	
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara			100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara			100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan dan Evaluas	50 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan dan Evaluas	50 Unit	100.000.000,00	0,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kutai Kartanegara			702.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara			902.588.000,00	200.000.000,00	

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kutai Kartanegara			702.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara			902.588.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah IUMK yang diterbitkan	75 Izin	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah IUMK yang diterbitkan	75 Izin	190.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	1) Jumlah Masyarakat Miskin usia produktif yang dilatih, 2) Jumlah Wirausaha yang dilatih	90 orang, 290 orang	512.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1) Jumlah Masyarakat Miskin usia produktif yang dilatih, 2) Jumlah Wirausaha yang dilatih	90 orang, 290 orang	512.588.000,00	0,00	Pergeseran Antar Rekening
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	Lanjutan Data Potensi Unggulan UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kutai Kartanegara			257.499.800,00	Kab. Kutai Kartanegara			257.499.800,00	0,00	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kutai Kartanegara			257.499.800,00	Kab. Kutai Kartanegara			257.499.800,00	0,00	
Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	1) Jumlah event dan publikasi yang diikuti, 2) Jumlah sarana dan prasarana usaha	2 Event, 1 Paket	257.499.800,00	Kab. Kutai Kartanegara	1) Jumlah event dan publikasi yang diikuti, 2) Jumlah sarana dan prasarana usaha	2 Event, 1 Paket	257.499.800,00	0,00	Pergeseran Rekening/ perbaikan Rincian kode rekening belanja
TOTAL				12.867.238.592,00				13.970.888.564,00	(1.103.649.972,00)	

BAB V
PENUTUP

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-PD) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM dibuat yang berdasarkan dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomo B-1219 /Bapp/V.1/065.11/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021;

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-PD) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2021, dan Perangkat Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah tersebut tergambar kedalam Program kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Berjalan (2021) dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah;

Akhir kata apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini akan kami lakukan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kritik dan saran sangat kami harapkan, terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak;



Jenggarong, Juli 2021

Kepala Dinas

Drs. TAJUDDIN

Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 196404051986031036